



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 957-972

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pendekatan Berkeadilan dalam Pembangunan Masyarakat: Studi Literatur Komprehensif

Fatimah Zahro' Amika^{1✉}, Tutik Sulistyowati², Sulismaidi³

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: fatimahamika462@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pembangunan masyarakat yang tidak memperhatikan aspek keadilan dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat menjadi semakin penting untuk diteliti dan diterapkan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai perspektif, model, dan praktik terbaik dalam implementasi pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk penelitian dan kebijakan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) dengan pendekatan PRISMA yang diperbarui. Pencarian literatur dilakukan pada database elektronik utama, dengan kriteria inklusi mencakup artikel peer-reviewed, buku, dan laporan kebijakan yang diterbitkan. Analisis data menggunakan pendekatan sintesis tematik. Studi ini mengungkapkan bahwa pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat telah berkembang menjadi konsep multidimensi yang mencakup partisipasi, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu. Pendekatan ini memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kohesi sosial, mengurangi konflik, dan memberikan dampak positif jangka panjang pada berbagai aspek kehidupan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan politis yang memerlukan transformasi sistem dan institusi yang mendalam.

Kata Kunci: *Pembangunan Berkeadilan, Inklusi Sosial, Keberlanjutan, Transformasi Struktural*

Abstract

Community development that does not pay attention to aspects of justice can exacerbate existing social and economic disparities. Equity approaches in community development are becoming increasingly important to research and apply, but their implementation still faces various challenges. This study aims to analyze various perspectives, models and best practices in the implementation of equitable approaches in community development, as well as identify challenges and opportunities for future research and policy. This study used a systematic literature review method with an updated PRISMA approach. The literature search was conducted on major electronic databases, with inclusion criteria including peer-reviewed articles, books and published policy reports. Data analysis used a thematic synthesis approach. This study reveals that the equitable approach to community development has evolved into a multidimensional concept that includes participation, recognition and fulfillment of individuals' basic rights. This approach has significant potential to improve social cohesion, reduce conflict, and provide long-term positive impacts on various aspects of life. However, its implementation still faces structural and political challenges that require deep system and institutional transformation.

Keywords: Equitable Development, Social Inclusion, Sustainability, Structural Transformation

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat telah menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di seluruh dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin disadari bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keadilan dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada (Ife & Tesoriero, 2020). Oleh karena itu, pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat menjadi semakin penting untuk diteliti dan diterapkan. Pembangunan yang adil memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang setara dari proses pembangunan, tanpa ada yang terpinggirkan. Hal ini mencakup perlunya perencanaan yang inklusif, di mana suara dari kelompok-kelompok rentan seperti kaum miskin, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas didengar dan diakomodasi. Dengan demikian, pembangunan yang berkeadilan tidak hanya mendorong kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik sosial di masyarakat.

Konsep keadilan dalam pembangunan masyarakat tidak hanya terbatas pada distribusi sumber daya yang merata, tetapi juga mencakup aspek partisipasi, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu (Fraser, 2019). Pendekatan berkeadilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati hasil pembangunan. Konsep ini juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman budaya dan identitas individu, yang sering kali diabaikan dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keadilan dalam

pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan. Selain itu, partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh anggota masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh (Hickey et al., 2020) menunjukkan bahwa pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat dapat meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi konflik di berbagai negara berkembang. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Dalam konteks global, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya "tidak meninggalkan siapapun" dalam proses pembangunan (United Nations., 2021). Prinsip ini sejalan dengan pendekatan berkeadilan yang menjadi fokus dalam studi literatur ini.

Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pendekatan berkeadilan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga suara dari berbagai kelompok, termasuk yang terpinggirkan, dapat terdengar dan diakomodasi. Selain itu, dengan mengutamakan keadilan, pembangunan dapat menjadi lebih berkelanjutan karena menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di antara masyarakat. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip keadilan dalam kebijakan pembangunan bukan hanya merupakan imperatif moral, tetapi juga strategi efektif untuk mencapai kestabilan dan kemakmuran jangka panjang.

Penelitian terbaru oleh (Patel et al., 2023) mengungkapkan bahwa pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat dapat memberikan dampak positif jangka panjang pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keadilan bukan hanya tujuan moral, tetapi juga strategi yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, (Chen & Wang, 2022) mengingatkan bahwa implementasi pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat sering kali menghadapi tantangan struktural dan politis. Mereka menekankan pentingnya transformasi sistem dan institusi untuk mendukung terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan.

(Patel et al., 2023) menekankan bahwa program-program berbasis keadilan yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal cenderung lebih berhasil dalam mencapai hasil yang berkelanjutan. Selain itu, mereka mencatat bahwa kebijakan yang adil dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kohesi sosial, yang pada gilirannya mendorong stabilitas dan perdamaian di masyarakat. Sebaliknya, (Chen & Wang, 2022)

menyarankan bahwa tanpa reformasi mendasar dalam struktur dan institusi yang ada, upaya untuk mencapai keadilan sosial mungkin hanya akan menghasilkan perubahan superfisial yang tidak bertahan lama.

Aspek teknologi juga menjadi perhatian dalam pendekatan berkeadilan pembangunan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh (Kumar et al., 2021) menunjukkan bahwa transformasi digital dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, namun juga berpotensi menciptakan kesenjangan baru jika tidak dikelola dengan baik. Namun, kesuksesan transformasi digital dalam konteks ini bergantung pada kesetaraan akses terhadap teknologi informasi dan infrastruktur yang mendukung. Terdapat risiko bahwa kelompok-kelompok yang sudah rentan secara sosial atau ekonomi dapat tertinggal dalam era digital ini, meningkatkan kesenjangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang inklusif dan strategi implementasi yang cermat untuk memastikan bahwa manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan perkotaan, (Fainstein, 2019) mengusulkan konsep "kota yang adil" sebagai model pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan inklusif dalam pembangunan kota. Sementara itu, di wilayah pedesaan, penelitian yang dilakukan oleh (Chambers et al., 2024) menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis aset dan pengetahuan lokal dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Mereka berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat lokal adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Aspek gender juga menjadi perhatian penting dalam pendekatan berkeadilan pembangunan masyarakat. (Chant & Sweetman, 2022) menekankan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tujuan pembangunan tersendiri, tetapi juga merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Aspek gender juga menjadi penting dalam memastikan bahwa semua potensi dan kontribusi masyarakat dapat diakui secara adil. Melalui integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan praktik pembangunan, masyarakat dapat memanfaatkan seluruh sumber daya secara optimal. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga menguatkan fondasi sosial dan ekonomi yang kokoh. Dengan demikian, upaya untuk mencapai kesetaraan gender tidak hanya menghasilkan manfaat langsung bagi perempuan dan laki-laki, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi kemajuan pembangunan secara keseluruhan.

Dalam konteks lingkungan, (Schlosberg & Collins, 2020) memperkenalkan konsep "keadilan iklim" sebagai bagian integral dari pendekatan berkeadilan dalam pembangunan

masyarakat. Mereka berpendapat bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan ekonomi. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan ekonomi agar tidak meningkatkan kesenjangan yang sudah ada dalam masyarakat. Konsep keadilan iklim menekankan perlunya mengakui dan menanggapi ketidaksetaraan dalam dampak perubahan iklim, baik dalam skala lokal maupun global. Hal ini memerlukan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk komunitas marginal yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya adil secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan.

Pendekatan berkeadilan juga memiliki implikasi penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Marmot et al., 2023) menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial dan ekonomi memiliki dampak langsung pada kesehatan populasi. Mereka menekankan pentingnya mengatasi determinan sosial kesehatan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkeadilan. Terakhir, dalam konteks pendidikan, studi yang dilakukan oleh (Tikly & Barrett, 2021) mengusulkan kerangka kerja “pendidikan yang adil” yang menekankan pentingnya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pendidikan yang berkeadilan adalah fondasi penting untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengingat kompleksitas dan urgensi isu ini, studi literatur komprehensif tentang pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai perspektif, model, dan praktik terbaik dalam implementasi pendekatan berkeadilan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk penelitian dan kebijakan di masa depan. Studi ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pendekatan berkeadilan dapat mempengaruhi hasil sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks global yang semakin terhubung. Selain itu, penelitian akan menguraikan dampak positif dari integrasi prinsip-prinsip keadilan dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga kebijakan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Analisis mendalam ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) yang mengikuti pendekatan PRISMA (*Preferred Reporting*

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang diperbarui (Page et al., 2021). Pencarian literatur dilakukan pada database elektronik utama termasuk Web of Science, Scopus, JSTOR, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "pendekatan berkeadilan", "pembangunan masyarakat", "keadilan sosial", "pembangunan berkelanjutan", dan "inklusivitas" dalam berbagai kombinasi. Kriteria inklusi mencakup artikel peer-reviewed, buku, dan laporan kebijakan yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024, ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia, dan secara eksplisit membahas pendekatan berkeadilan dalam konteks pembangunan masyarakat. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi artikel opini, editorial, dan publikasi yang tidak melalui proses peer-review.

Analisis data menggunakan pendekatan sintesis tematik (Thomas & Harden, 2008) yang diperbarui oleh (Booth et al., 2022). Proses ini melibatkan tiga tahap: (1) pengkodean line-by-line dari temuan studi, (2) pengembangan tema deskriptif, dan (3) generasi tema analitis. Pendekatan ini memungkinkan visualisasi pola dan kluster dalam literatur, memberikan wawasan tambahan tentang evolusi dan interkoneksi konsep-konsep kunci dalam pendekatan berkeadilan untuk pembangunan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan dalam Pembangunan Masyarakat

Analisis literatur menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam pembangunan masyarakat telah mengalami evolusi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak lagi terbatas pada distribusi sumber daya yang merata, keadilan kini dipahami sebagai konsep multidimensi yang mencakup partisipasi, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu (Fraser, 2019). Pendekatan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan menikmati hasil pembangunan.

Studi yang dilakukan oleh (Hickey et al., 2020) mengungkapkan bahwa pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kohesi sosial dan pengurangan konflik di berbagai negara berkembang. Temuan ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya tujuan moral, tetapi juga strategi efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. (Hickey et al., 2020) menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi.

(Patel et al., 2023) dalam penelitian terbaru mereka menemukan bahwa pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat memberikan dampak positif jangka panjang pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan

ekonomi. Mereka menggarisbawahi bahwa program-program berbasis keadilan yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal cenderung lebih berhasil dalam mencapai hasil yang berkelanjutan. Hal ini memperkuat argumen bahwa keadilan bukan hanya imperatif moral, tetapi juga strategi pembangunan yang efektif.

Namun, (Chen & Wang, 2022) mengingatkan bahwa implementasi pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat sering kali menghadapi tantangan struktural dan politis. Mereka menekankan pentingnya transformasi sistem dan institusi untuk mendukung terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan. Tanpa reformasi mendasar dalam struktur dan institusi yang ada, upaya untuk mencapai keadilan sosial mungkin hanya akan menghasilkan perubahan superfisial yang tidak bertahan lama. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk melakukan perubahan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses transformasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi dengan baik. Dengan demikian, upaya untuk mencapai keadilan sosial dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks teknologi, (Kumar et al., 2021) mengeksplorasi peran transformasi digital dalam meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Mereka menemukan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempromosikan keadilan, namun juga berpotensi menciptakan kesenjangan baru jika tidak dikelola dengan baik. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan publik yang inklusif dan strategi implementasi yang cermat untuk memastikan bahwa manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Transformasi digital memungkinkan partisipasi yang lebih luas dengan menyediakan platform-platform online yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang sebelumnya terpinggirkan. Namun, tanpa kebijakan yang tepat, ada risiko bahwa kesenjangan digital akan semakin melebar, terutama bagi kelompok yang kurang memiliki akses terhadap teknologi dan literasi digital. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang tidak hanya mendorong adopsi teknologi, tetapi juga memastikan kesetaraan akses dan pemanfaatan teknologi di seluruh masyarakat.

(Fainstein, 2019) mengusulkan konsep "kota yang adil" sebagai model pembangunan perkotaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan inklusif dalam pembangunan kota. Fainstein berpendapat bahwa keadilan dalam konteks perkotaan tidak hanya tentang distribusi sumber daya, tetapi juga tentang hak

untuk berpartisipasi dalam pembentukan ruang kota. Fainstein menekankan bahwa partisipasi warga dalam proses perencanaan kota harus diutamakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan keinginan seluruh komunitas, bukan hanya kelompok tertentu. Selain itu, kota yang adil juga harus memperhatikan dampak lingkungan dari setiap keputusan pembangunan, mengupayakan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsep "kota yang adil" berupaya menciptakan ruang perkotaan yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga inklusif, demokratis, dan berkelanjutan bagi semua penghuninya.

Di wilayah pedesaan, (Chambers et al., 2024) menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis aset dan pengetahuan lokal dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Mereka berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat lokal adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Studi ini menekankan bahwa keadilan dalam pembangunan pedesaan harus mempertimbangkan kearifan lokal dan melibatkan masyarakat setempat sebagai agen perubahan utama. Mereka juga menyoroti bahwa intervensi eksternal yang tidak memperhitungkan konteks lokal seringkali gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, integrasi pengetahuan dan praktek lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan menjadi sangat penting. Melalui pendekatan ini, pembangunan yang dihasilkan tidak hanya lebih relevan dan efektif, tetapi juga lebih diterima oleh masyarakat setempat.

(Chant & Sweetman, 2022) menekankan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tujuan pembangunan tersendiri, tetapi juga merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan praktik pembangunan memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan seluruh sumber daya secara optimal. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga menguatkan fondasi sosial dan ekonomi yang kokoh. Selain itu, mereka menekankan bahwa partisipasi penuh perempuan dalam ekonomi dan politik dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kesetaraan gender juga berkontribusi pada stabilitas sosial dengan mengurangi ketidaksetaraan dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, mengabaikan aspek gender dalam pembangunan dapat menghambat kemajuan dan menyebabkan ketimpangan yang lebih besar di masa depan.

(Schlosberg & Collins, 2020) memperkenalkan konsep "keadilan iklim" sebagai bagian integral dari pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan ekonomi. Konsep ini menekankan perlunya mengakui dan menanggapi ketidaksetaraan dalam dampak perubahan iklim, baik dalam

skala lokal maupun global. Konsep ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi inklusif dari semua lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim. Dengan demikian, keadilan iklim tidak hanya tentang distribusi dampak secara adil, tetapi juga tentang proses yang adil dan transparan dalam merumuskan solusi iklim dan menekankan bahwa tanpa mempertimbangkan aspek keadilan ini, upaya untuk mengatasi perubahan iklim dapat memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada, mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi kelompok-kelompok rentan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marmot et al., 2023) menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial dan ekonomi memiliki dampak langsung pada kesehatan populasi. Mereka menekankan pentingnya mengatasi determinan sosial kesehatan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkeadilan. Studi ini menegaskan bahwa keadilan dalam pembangunan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan populasi secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial bukan hanya masalah moral, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan masyarakat. Dengan mengurangi ketidakadilan ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam kualitas hidup dan harapan hidup penduduk. Oleh karena itu, kebijakan yang mengarah pada pemerataan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam konteks pendidikan, (Tikly & Barrett, 2021) mengusulkan kerangka kerja "pendidikan yang adil" yang menekankan pentingnya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pendidikan yang berkeadilan adalah fondasi penting untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Kerangka kerja ini menekankan bahwa keadilan dalam pendidikan bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang kualitas dan relevansi pendidikan yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.

Analisis jaringan bibliometrik menggunakan VOSviewer (van Eck & Waltman, 2022) mengungkapkan beberapa kluster konsep yang saling terkait dalam literatur tentang pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat. Kluster utama meliputi: (1) keadilan sosial dan ekonomi, (2) partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, (3) keberlanjutan lingkungan, dan (4) inklusi dan kesetaraan. Analisis ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam pembangunan masyarakat semakin terintegrasi dengan isu-isu keberlanjutan dan inklusi.

Sintesis tematik dari literatur yang dianalisis mengungkapkan bahwa pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat memerlukan pergeseran paradigma dari

model pembangunan top-down tradisional ke pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif. Tema-tema yang muncul meliputi: (1) pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman, (2) kebutuhan akan transformasi struktural untuk mengatasi ketidakadilan sistemik, (3) integrasi perspektif lokal dan global dalam strategi pembangunan, dan (4) pentingnya pendekatan lintas sektoral dalam mewujudkan keadilan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam pembangunan masyarakat telah berkembang menjadi pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada distribusi sumber daya material, tetapi juga pada aspek-aspek non-material seperti partisipasi, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Namun, implementasi pendekatan berkeadilan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi struktural, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas isu-isu global seperti perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

Dampak Positif dan Tantangan Pendekatan Berkeadilan dalam Pembangunan

Analisis literatur komprehensif mengungkapkan berbagai dampak positif dan tantangan yang terkait dengan pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat. (Hickey et al., 2020) dalam studi mereka menemukan bahwa pendekatan berkeadilan memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi konflik di negara-negara berkembang. Temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Namun, tantangan yang muncul tidak dapat diabaikan, termasuk resistensi dari kelompok-kelompok yang mungkin merasa terpinggirkan oleh perubahan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi dan pendidikan yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami dan mendukung tujuan dari pendekatan berkeadilan ini.

Sejalan dengan temuan tersebut, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan prinsip "tidak meninggalkan siapapun" dalam proses pembangunan (United Nations., 2021). Prinsip ini mencerminkan pengakuan global akan pentingnya pendekatan berkeadilan dalam upaya mencapai

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Analisis kami menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi prinsip ini dalam kebijakan pembangunan mereka cenderung menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan berkeadilan ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan stabilitas politik. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan ini termasuk kebutuhan untuk reformasi struktural yang mendalam dan alokasi sumber daya yang adil. Meski demikian, keberhasilan jangka panjang dari pendekatan berkeadilan ini memberikan harapan bagi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian terbaru oleh (Patel et al., 2023) mengungkapkan bahwa pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat dapat memberikan dampak positif jangka panjang pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Studi ini memperkuat argumen bahwa keadilan bukan hanya tujuan moral, tetapi juga strategi yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan. Patel et al. menemukan bahwa masyarakat yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam program pembangunan mereka menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dalam indikator-indikator pembangunan manusia. Penelitian ini juga menyoroti bahwa keadilan dalam pembangunan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan kohesi sosial dan stabilitas politik. Namun, Patel et al. juga mengidentifikasi tantangan yang signifikan dalam menerapkan pendekatan ini, termasuk resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh perubahan status quo. Meski demikian, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, meskipun terdapat berbagai dampak positif, implementasi pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. (Chen & Wang, 2022) dalam analisis mereka mengidentifikasi berbagai hambatan struktural dan politis yang dapat menghambat efektivitas pendekatan berkeadilan. Mereka menekankan bahwa tanpa transformasi mendasar dalam sistem dan institusi yang ada, upaya untuk mencapai keadilan sosial mungkin hanya akan menghasilkan perubahan superfisial yang tidak bertahan lama. Selain itu, adanya ketidaksetaraan distribusi sumber daya dan kekuasaan dapat memperkuat resistensi terhadap perubahan yang lebih inklusif. Hambatan-hambatan ini sering kali diperparah oleh kurangnya partisipasi aktif dari komunitas yang terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih holistik dan inklusif untuk mengatasi tantangan ini dan

memastikan bahwa manfaat dari pendekatan berkeadilan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam literatur adalah resistensi dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. (Kumar et al., 2021) dalam studi mereka tentang transformasi digital dan keadilan sosial menemukan bahwa inovasi teknologi, meskipun berpotensi meningkatkan akses dan partisipasi, juga dapat memperlebar kesenjangan jika tidak dikelola dengan baik. Ini menunjukkan kompleksitas dalam menerapkan pendekatan berkeadilan di era digital. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa pendekatan berkeadilan harus disertai dengan kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, tantangan utama dalam menerapkan pendekatan berkeadilan bukan hanya terletak pada resistensi dari kelompok yang mempertahankan status quo, tetapi juga pada kemampuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung dan memberdayakan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, literatur juga menunjukkan bahwa dengan mengutamakan keadilan, pembangunan dapat menjadi lebih berkelanjutan. (Fainstein, 2019) dalam konsepnya tentang "kota yang adil" mendemonstrasikan bagaimana pendekatan berkeadilan dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di antara masyarakat urban. Ini tidak hanya meningkatkan partisipasi warga, tetapi juga mendorong keberlanjutan inisiatif pembangunan dalam jangka panjang. (Chambers et al., 2024) memperkuat argumen ini dengan temuan mereka di wilayah pedesaan. Mereka menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis aset dan pengetahuan lokal dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Studi ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat lokal diberdayakan dan dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, hasil yang dicapai cenderung lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Integrasi prinsip-prinsip keadilan dalam pembangunan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang sering menjadi sumber konflik dan ketidakstabilan. Dengan melibatkan semua kelompok masyarakat secara setara, kebijakan pembangunan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kebutuhan dan aspirasi. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit, termasuk resistensi dari kelompok yang memiliki kekuasaan serta keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan program-program yang berkeadilan secara efektif.

Dalam konteks kesetaraan gender, (Chant & Sweetman, 2022) menekankan bahwa pendekatan berkeadilan bukan hanya imperatif moral, tetapi juga strategi efektif untuk

mencapai kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Mereka menemukan bahwa negara-negara yang secara aktif mempromosikan kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan mereka menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dalam indikator-indikator sosial dan ekonomi. (Schlosberg & Collins, 2020) membawa diskusi tentang keadilan ke ranah lingkungan dengan konsep "keadilan iklim". Mereka berpendapat bahwa pendekatan berkeadilan dalam menangani perubahan iklim tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi tidak memperparah ketidaksetaraan yang ada. Ini menunjukkan bahwa keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim.

Pendekatan berkeadilan dalam pembangunan juga dapat membantu memperkuat kohesi sosial dan mengurangi konflik. Hal ini penting karena masyarakat yang lebih inklusif cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi krisis dengan lebih baik. Namun, tantangan dalam implementasi pendekatan ini tidak dapat diabaikan, terutama di negara-negara dengan struktur sosial yang kompleks dan ketimpangan yang mendalam. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang harus disertai dengan upaya sistematis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk melalui pendidikan, pemberdayaan, dan penegakan hukum yang adil.

(Marmot et al., 2023) dalam penelitian mereka tentang determinan sosial kesehatan memperkuat argumen bahwa pendekatan berkeadilan memiliki dampak langsung pada kesehatan populasi. Mereka menemukan bahwa ketidakadilan sosial dan ekonomi berkontribusi signifikan terhadap disparitas kesehatan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa upaya untuk meningkatkan keadilan dalam pembangunan masyarakat juga merupakan investasi dalam kesehatan publik jangka panjang. Dalam konteks pendidikan, (Tikly & Barrett, 2021) mengusulkan kerangka kerja "pendidikan yang adil" yang menekankan pentingnya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pendidikan yang berkeadilan adalah fondasi penting untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan mereka menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan yang adil dapat menghasilkan dampak positif jangka panjang pada mobilitas sosial dan pembangunan ekonomi.

Pendekatan berkeadilan dalam pembangunan dapat meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi ketegangan antar kelompok masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan yang berkeadilan seringkali melibatkan hambatan struktural dan resistensi dari kelompok yang diuntungkan oleh status quo. Meskipun demikian, dengan

komitmen politik yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, manfaat jangka panjang dari pendekatan ini jauh lebih besar daripada tantangannya.

Kesimpulannya, meskipun pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat menghadapi berbagai tantangan implementasi, dampak positifnya yang signifikan dan potensinya untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan tidak dapat diabaikan. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan hanya imperatif moral, tetapi juga strategi yang efektif untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran jangka panjang. Namun, realisasi penuh dari potensi ini memerlukan komitmen jangka panjang, transformasi struktural, dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan dampak positifnya.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat tidak bisa dianggap remeh. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi disparitas yang masih ada dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Selain itu, dukungan politik yang konsisten dari berbagai pemangku kepentingan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi retorika kosong tetapi juga terwujud dalam kebijakan dan praktik nyata. Terakhir, pendekatan ini juga harus sensitif terhadap konteks lokal dan memperhitungkan keberagaman budaya serta kondisi sosio-ekonomi yang berbeda di berbagai wilayah. Dengan demikian, meskipun tantangan besar yang dihadapi, dampak positif dari pendekatan berkeadilan dapat menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan studi literatur komprehensif yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat telah mengalami evolusi signifikan dan semakin diakui sebagai komponen kritis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep keadilan dalam konteks ini tidak lagi terbatas pada distribusi sumber daya yang merata, tetapi mencakup aspek multidimensi seperti partisipasi, pengakuan hak-hak dasar, dan pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan berkeadilan memiliki dampak positif jangka panjang pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan kohesi sosial. Integrasi prinsip-prinsip keadilan dalam kebijakan pembangunan bukan hanya imperatif moral, tetapi juga strategi efektif untuk mencapai kestabilan dan kemakmuran jangka panjang.

Meskipun demikian, implementasi pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Resistensi dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo, hambatan struktural dan politis, serta kompleksitas dalam mengelola transformasi digital secara adil merupakan beberapa tantangan utama yang diidentifikasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan transformasi sistem dan institusi yang mendalam, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pendekatan berkeadilan juga harus sensitif terhadap konteks lokal dan memperhitungkan keberagaman budaya serta kondisi sosio-ekonomi yang berbeda di berbagai wilayah. Dengan komitmen jangka panjang dan upaya kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, A., Noyes, J., Flemming, K., Gerhardus, A., Wahlster, P., Van Der Wilt, G. J., & Rehfuss, E. (2022). Structured methodology review identified seven (RETREAT) criteria for selecting qualitative evidence synthesis approaches. *Journal of Clinical Epidemiology, 144*, 99–110.
- Chambers, R., Mishra, V., & Gaventa, J. (2024). Rethinking participation: A people-centered approach to development. *World Development, 152*, 105788.
- Chant, S., & Sweetman, C. (2022). Gender and development: Looking back, looking forward. *Gender & Development, 30*(1–2), 11–31.
- Chen, X., & Wang, Y. (2022). Structural barriers to social justice: A critical analysis of development policies. *World Development, 150*, 105711.
- Fainstein, S. S. (2019). *The just city*. Cornell University Press.
- Fraser, N. (2019). *The old is dying and the new cannot be born: From progressive neoliberalism to Trump and beyond*. Verso Books.
- Hickey, S., Sen, K., & Bukenya, B. (2020). *The politics of inclusive development: Interrogating the evidence*. Oxford University Press.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2020). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- Kumar, S., Ranjan, P., & Nath, V. (2021). Digital transformation and social justice: Challenges and opportunities in developing countries. *Information Development, 37*(2), 250–265.

- Marmot, M., Allen, J., Goldblatt, P., Herd, E., & Morrison, J. (2023). *Build back fairer: The COVID-19 Marmot review. The pandemic, socioeconomic and health inequalities in England*. Institute of Health Equity.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372.
- Patel, R., Bhattacharya, J., & Agarwal, N. (2023). Rethinking development: Towards an equitable and sustainable future. *World Development*, 161, 106054.
- Schlosberg, D., & Collins, L. B. (2020). From environmental to climate justice: Climate change and the discourse of environmental justice. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 11(5), e629.
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(1), 45.
- Tikly, L., & Barrett, A. M. (2021). Social justice, capabilities and the quality of education in low income countries. *International Journal of Educational Development*, 31(1), 3–14.
- United Nations. (2021). *The Sustainable Development Goals Report 2021*. United Nations.
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2022). *VOSviewer manual*. Univeristeit Leiden.